

STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN DALAM KONSTELASI MEA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Gontom C. Kifli¹⁾ dan Erwan Wahyudi²⁾

BPTP Kalimantan Barat,
BPTP Jambi
Jl. Budi Utomo 45 Pontianak
Jl. Samarinda Paal V Kotabaru Jambi,

ABSTRAK

Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut dengan beragam dinamikanya. Perkembangan terakhir pada tahun 2008 dengan adanya rekrutmen tenaga lepas pembantu penyuluh pertanian (THL TBPP) dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya merupakan upaya pemerintah dalam merespon minimnya tenaga penyuluh pertanian atau PPL. Peran penyuluh pertanian tetap dirasakan sangat penting dan menjadi kunci di dalam keberhasilan pembangunan pertanian di suatu daerah, karena penyuluh pertanian merupakan agen yang menjembatani inovasi antara penghasil inovasi teknologi pertanian dengan penggunaannya terutama petani, terlebih dalam era MEA saat ini yang menuntut profesionalisme dan tingginya daya saing. Tujuan kajian adalah memetakan kondisi dan posisi penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini dan merancang strategi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan Malaysia terkait dengan konstelasi MEA. Kajian dilakukan dengan metode analisis statistik deskriptif yang kemudian diterjemahkan dalam pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian melalui penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan negara memiliki nilai strategis dan potensi yang tinggi berupa sebagian besar penyuluh pertanian berada dekat dan di sekitar wilayah perbatasan, jumlah minimal ideal penyuluh pertanian telah mencukupi sesuai ketentuan yang ada. Strategi penyuluhan pertanian yang sebaiknya dilakukan di wilayah perbatasan tersebut, kaitannya dengan konstelasi MEA adalah berupa; mengintegrasikan pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluh pertanian di dalam kerangka program atau kegiatan terpadu lokal dan nasional di wilayah perbatasan yang telah ada dan ditetapkan. Diperlukan regenerasi para penyuluh pertanian dari penyuluh senior kepada penyuluh yang lebih muda. Strategi lainnya adalah dengan membenahi, memantapkan dan menetapkan struktur organisasi penyuluhan pertanian terakhir adalah dengan memberdayakan penyuluh swadaya dengan melibatkan atau mengikutsertakan penyuluh swadaya dalam seluruh kegiatan atau program penyuluh pertanian di wilayahnya.

Kata kunci: Peran penyuluh, peningkatan daya saing, konstelasi MEA, wilayah perbatasan dan Kalimantan Barat.

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salahsatu provinsi yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Malaysia. Terdapat 5 kabupaten yang memiliki perbatasan tersebut adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain 5 Kabupaten tersebut, terdapat Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Landak yang memiliki wilayah strategis, karena dekat dengan wilayah perbatasan negara Malaysia. Wilayah-wilayah kabupaten perbatasan tersebut sebagian besar memiliki potensi wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan. Wilayah pertanian yang diusahakan oleh petani adalah merupakan lahan pasang surut dan lahan kering, serta untuk wilayah perkebunan, umumnya diusahakan untuk karet, kelapa dan kelapa sawit, serta sebagian kecil untuk tanaman lada. Perkebunan sawit terbagi dalam pengusahaannya menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Kawasan perbatasan negara, yang termasuk 5 kabupaten tersebut, termasuk di dalam kawasan strategis nasional, seperti tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Penetapan kawasan tersebut didasarkan kepada pertimbangan berbagai aspek pembangunan nasional, diantaranya pemerataan pembangunan dan menjadikan wilayah perbatasan negara menjadi halaman depan negara, yang selama ini wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah ibukota. Penetapan kawasan strategis tersebut sejalan dengan paradigma konstelasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, yang salahsatu aspek penting adalah terbukanya pasar barang dan jasa antar negara di dalam negara anggota ASEAN dan nilai penting di dalam MEA yang menjadi perhatian dan harus disikapi dari pasar bebas tersebut adalah daya saing, yang secara generik dikatakan bahwa pemenang adalah yang memiliki daya saing tinggi atau yang dapat bersaing.

Produktivitas komoditas pertanian secara umum akan dipengaruhi oleh lingkungan dan pengelolaannya, salahsatu diantaranya adalah inovasi teknologi pertanian. Inovasi teknologi tersebut merupakan faktor dari luar petani yang diintroduksikan melalui agen inovasi, seperti penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan salahsatu yang disebutkan oleh Rogers (2003) sebagai *change agent* atau agen perubahan, yang difungsikan untuk mengubah perilaku klien menjadi lebih baik seperti yang diinginkan oleh agen. Klien dalam konteks pembangunan pertanian adalah petani, serta perubahan perilaku adalah perubahan sistem berusaha tani yang dilakukan petani yang bermuara pada terjadinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

MEA telah berlaku saat ini dan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian melalui sistem penyuluhan pertaniannya. Tantangan tersebut berupa formulasi strategi penyuluhan yang tepat untuk wilayah perbatasan negara dalam mendukung pembangunan pertanian di Kalimantan Barat, baik ditinjau dari aspek hasil produksi pertanian sebagai komoditas komersial maupun aspek sumber daya manusia penyuluh pertanian, sehingga kondisi ini menarik untuk dilakukan penelitian atau kajian dalam mendapatkan strategi tersebut.

Permasalahan

1. Bagaimanakah posisi dan kondisi penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini, khususnya di wilayah perbatasan negara?
2. Bagaimanakah rancangan strategi penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat dalam konstelasi MEA?

Tujuan

1. Memetakan posisi dan kondisi penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan Kalimantan Barat saat ini.
2. Merancang strategi sistem penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat dalam konstelasi MEA.

BAHAN DAN METODE

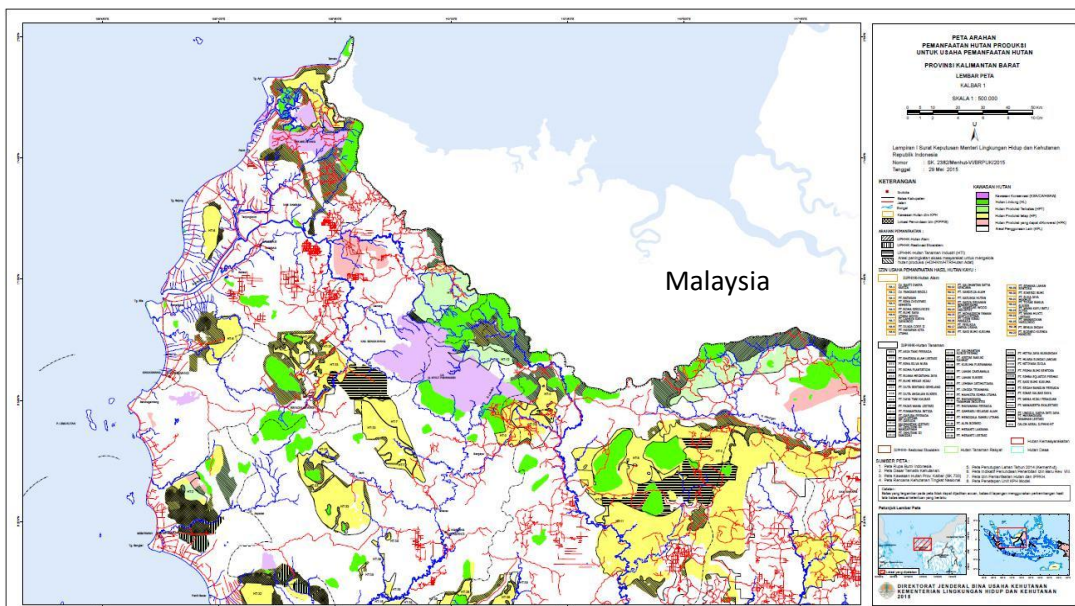
Metode kajian atau penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengambilan data sekunder yang didapatkan dari koleksi data penyuluhan lingkup Kalimantan Barat yang didapatkan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat. Data tersebut selanjutnya diolah dan kemudian diartikan dan dimaknai dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Data penyuluhan meliputi 14 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Kalimantan Barat, khususnya kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dengan negara bagiannya Serawak. Ibukota Serawak adalah Kuching, yang berjarak + 132 km atau jarak tempuh kendaraan 2 jam 30 menit dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau. Kabupaten lainnya selain Kabupaten Sanggau, yang berbatasan dengan wilayah Serawak Malaysia adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten lain yang berada di sekitar perbatasan namun dekat dengan wilayah perbatasan adalah Kota Singkawang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten- kabupaten yang berbatasan dengan wilayah perbatasan, sebagian besar merupakan lahan kering dan lahan pasang surut yang saat ini peruntukkannya digunakan untuk lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan sebagian lainnya menjadi wilayah hutan (Gambar 1). Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Pemanfaatan lahan kering tersebut umumnya diusahakan oleh petani dengan komoditas padi lahan kering dan palawija, terutama jagung. Kabupaten Bengkayang menjadi sentra produksi jagung di Kalimantan Barat saat ini, data Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Kalimantan Barat (2015) menunjukkan luas tanam jagung mencapai 25.640 Ha dengan produktivitas rata-rata 4,05 ton/Ha pada tahun 2014. Sementara itu, Kabupaten Sambas menjadi sentra produksi padi lahan pasang surut dengan luas panen 92.152 Ha dan produktivitas rata-rata 3,342 ton/Ha. Perkebunan sawit yang diusahakan oleh perusahaan besar dan rakyat hampir merata di seluruh Kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan negara Malaysia.

Gambar 1. Peta penggunaan lahan Kalimantan Barat.



Sumber: Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

Wilayah dengan selain warna putih pada Gambar 1 di atas menunjukkan lahan yang dapat digunakan sebagai fungsi hutan. Wilayah tersebut sebagian besar telah digunakan untuk pengusahaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kondisi tersebut menunjukkan masih luas dan berpotensi wilayah tersebut untuk pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, terutama untuk pertanian lahan kering dan lahan pasang surut. Potensi upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan masih tinggi, karena produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan di Kalimantan Barat relatif masih rendah, terutama untuk produksi padi sawah (pasang surut) maupun padi lahan kering. Hasil produksi dan produktivitas beberapa tanaman pangan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil produksi dan produktivitas beberapa tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014

No.	Komoditas	Produksi (ton)	Provititas rata-rata (Ton/Ha)	Provititas rata-rata Nasional (Ton/Ha)
1.	Padi	1.372.696	3,035	5,280
	<i>Padi pasang surut</i>	<i>1.197.984</i>	<i>3,357</i>	<i>t.a</i>
	<i>Padi ladang</i>	<i>174.712</i>	<i>1,831</i>	<i>t.a</i>
2.	Jagung	135.461	3,679	5,170
3.	Kedelai	3.161	1,560	1,560

Sumber: BPS Kalimantan Barat (2015)

Produksi dan produktivitas padi maupun palawija yang belum maksimal sesuai potensi yang dimiliki dan produktivitas rata-rata nasional (Tabel 1), untuk komoditas padi dan jagung, kecuali untuk kedelai, memberikan peluang untuk dilakukan rekayasa teknologi guna peningkatan produksi melalui introduksi dan adopsi inovasi teknologi pertanian. Inovasi teknologi pertanian yang telah sesuai dengan agroekosistem wilayah pengembangan setempat merupakan inovasi teknologi spesifik lokasi. Badan Litbang Pertanian (2013) menjelaskan bahwa inovasi teknologi spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat. Inovasi teknologi pertanian sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi penyuluh pertanian karena di dalam inovasi tersebut terkandung hal, ide dan teknologi baru dan terus berkembang yang dibutuhkan oleh petani sebagai pelaku utama dalam meningkatkan dan mengembangkan usahatani.

Peran penyuluh pertanian sebagai agen perubahan (*change agent*) tetap relevan dalam kondisi saat ini. Agen perubahan menurut Tan (1987) merupakan bagian dari sistem perubahan atau *change system* dari komponen sistem penyuluhan, yang memiliki peran umum sebagai penghubung antara penghasil teknologi dan sistem klien (pengguna teknologi), sedangkan peran penghubung tersebut memiliki tugas untuk mendiseminasikan inovasi teknologi spesifik lokasi sehingga dapat dipahami dan diadopsi oleh klien, yaitu petani. Penyuluh pertanian di Indonesia pada saat ini, secara umum dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan Pegawai Negeri Sipil (PPL PNS), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP), Penyuluh swadaya dan Penyuluh swasta. Komposisi penyuluh pertanian di Kalimantan Barat saat ini dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 2. Komposisi dan jumlah penyuluh pertanian di Kalimantan Barat Tahun 2015

No.	Propinsi/Kab/Kota	PPL PNS	THL TBPP	Swadaya	Jumlah	Persen
	(orang).....				
1.	Propinsi	12	-	-	12	0,73
2.	Sambas	80	71	93	244	14,82
3.	Bengkayang	39	72	34	145	8,81
4.	Landak	88	60	13	161	9,78
5.	Sanggau	53	47	74	174	10,57
6.	Sintang	80	22	27	129	7,84
7.	Kapuas Hulu	79	54	13	146	8,87
8.	Sekadau	40	30	11	81	4,92
9.	Kota Singkawang	27	7	2	36	2,19
10.	Mempawah	65	3	24	92	5,59
11.	Ketapang	64	49	-	113	6,87
12.	Melawi	32	20	53	105	6,38
13.	Kayong Utara	22	6	-	28	1,70
14.	Kubu Raya	56	19	82	157	9,54
15.	Kota Pontianak	6	1	16	23	1,40
Jumlah		741	461	442	1.644	100,00
Persentase (%)		45,07	28,04	26,89		

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. Kalimantan Barat, 2015
 Keterangan: Kabupaten yang ditulis miring berbatasan langsung dan dekat dengan perbatasan Negara Malaysia.

Penyuluh pertanian di 8 kabupaten/kota yang berbatasan dan dekat dengan perbatasan wilayah negara Malaysia, termasuk banyak atau mendominasi, yaitu sebesar 67,8% dari jumlah total penyuluh di Kalimantan Barat, serta penyuluh pertanian di Kabupaten Sambas memiliki jumlah yang paling banyak di antara penyuluh pertanian kabupaten lainnya. Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM), terutama SDM dalam konteks pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. SDM penyuluh pertanian di Kalimantan Barat saat ini sebanyak 1.644 orang. Jumlah perbandingan minimal ideal penyuluh adalah 1 orang untuk satu desa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab V Pasal 46 Nomor (4), maka untuk wilayah Kalimantan Barat dengan jumlah desa sebanyak 1.737 desa (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2015), diperlukan sedikitnya 1.737 orang penyuluh pertanian, maka dengan demikian kekurangan jumlah penyuluh pertanian yang diperlukan adalah sebanyak 93 orang. Jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki tersebut relatif telah cukup terpenuhi (94,6%), sehingga dalam segi sumber daya manusia, kebutuhan tersebut hanya memerlukan sedikit tambahan.

Perbandingan ideal dari keperluan penyuluh pertanian termasuk di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, telah terpenuhi, sehingga langkah selanjutnya adalah menetapkan atau meningkatkan kualitas dari SDM penyuluh pertanian yang telah ada tersebut. Komposisi penyuluh pertanian PPL PNS di Kalimantan Barat sebagian besar memiliki jenjang pendidikan terakhir sarjana atau yang sederajat, yaitu sebanyak 49,19% dari jumlah total PPL PNS yang ada (Tabel 3). Kondisi tersebut menjadi potensi yang cukup ideal di dalam mendukung penyuluh pertanian di Kalimantan Barat, termasuk di wilayah perbatasan.

Tabel 3. Pendidikan PPL PNS di Kalimantan Barat Tahun 2015

Pendidikan	Jumlah	
	Orang	Persentase
SMP/ sederajat	1	0,13
SMA/ sederajat	216	29,03
Diploma-1	3	0,40
Diploma-3	112	15,05
Diploma-4	40	5,38
Sarjana/ sederajat	366	49,19
Pascasarjana/ S2	6	0,81
Jumlah	744	100,00

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Prov. Kalimantan Barat, 2015

Penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat, selain didukung dengan tingkat pendidikan PPL PNS di Kalimantan Barat yang sebagian besar adalah sarjana, didukung juga oleh tingkat pendidikan penyuluh pertanian lainnya, yaitu THL TBPP, yang seluruhnya berpendidikan sarjana atau yang sederajat. THL TBPP merupakan penyuluh pertanian yang dikontrak kerjasamakan oleh pemerintah dengan salah satu syarat saat perekrutannya adalah memiliki pendidikan minimal sarjana atau tingkat S-1, sehingga dengan demikian sebagian besar penyuluh pertanian di Kalimantan Barat memiliki pendidikan sarjana atau yang sederajat. Potensi pendidikan yang dimiliki SDM penyuluh pertanian tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang berdampak positif dan menguntungkan bagi sistem penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat, sehingga secara langsung dapat memperlancar proses terjadinya adopsi dan difusi inovasi teknologi spesifik lokasi, baik oleh penyuluh pertanian sendiri dan terutama oleh pengguna yaitu petani. Muara dari diadopsinya inovasi teknologi pertanian adalah meningkatnya produksi, produktivitas, pendapatan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan petani.

Komposisi umur penyuluh pertanian, khususnya PPL PNS saat ini menunjukkan bahwa umur PPL PNS didominasi oleh kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 42,07% dari jumlah PPL PNS yang ada dengan rata-rata umur 46 tahun. Kelompok umur tersebut secara tersirat mengindikasikan bahwa kelompok umur dengan jumlah terbanyak sebesar 42,07% tersebut, diduga pada 1-10 tahun kemudian akan memasuki atau menjadi pensiun/purna tugas, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dirancang dan dilakukan dalam mempersiapkan terjadinya regenerasi atau peralihan generasi dari generasi senior dan mapan akan pengalaman menyuluh kepada yang lebih muda dan masih banyak memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam melakukan penyuluhan. Upaya regenerasi tersebut akan sangat penting, mengingat penyuluh muda relatif masih minim pengalaman, selain itu diperkirakan di masa mendatang, termasuk di dalam era MEA, tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan akan lebih berat.

Tabel 4. Lama pengalaman menyuluh PPL PNS di Kalimantan Barat pada Tahun 2015

Lama pengalaman (tahun)	Jumlah	
	Orang	Persentase
4 - 16	156	20,97
17 - 29	275	36,96
30 - 42	313	42,07
Jumlah	744	100,00
Rata-rata	25,74 + 9,45 tahun	

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Prov. Kalimantan Barat, 2015.

Pengalaman dalam melakukan penyuluhan pertanian dari PPL PNS memiliki variasi yang dapat digolongkan kepada tiga golongan (Tabel 4). Sebagian besar PPL PNS sebesar 42,07% dari jumlah keseluruhan, memiliki pengalaman yang lama, serta rata-rata pengalaman melakukan penyuluhan dari seluruh PPL PNS adalah selama 25,74 tahun, yang berarti telah cukup lama. Kondisi tersebut menjadi potensi di dalam melakukan penyuluhan lapangan yang dilakukan PPL PNS. Lamanya pengalaman tersebut secara langsung berarti telah banyak mengalami berbagai kondisi penyuluhan yang telah dialami, sehingga memiliki berbagai pengetahuan tentang penyuluhan pertanian, baik teknis, pendekatan, metode dan kebijakan, sehingga pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan tugasnya, selain itu pengalaman tersebut menjadi bahan atau materi di dalam upaya berbagi ilmu dan pengetahuan dengan penyuluh pertanian yang lebih muda, termasuk penyuluh pertanian THL TBPP yang masih belum lama menjadi penyuluh pertanian.

Bidang keahlian penyuluh pertanian, beberapa mengalami perubahan istilah atau orientasi, yaitu polivalen dan monovalen, asal kata dari *valent* yang berarti bernilai. Polivalen dalam istilah penyuluh pertanian di Indonesia berarti seorang penyuluh menangani beberapa bidang sub-bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan, sedangkan monovalen berarti penyuluh tersebut menangani hanya dalam bidang tertentu saja sesuai bidang keahliannya atau potensi bidang pertanian di wilayah kerjanya. Orientasi bidang tugas tersebut pernah beberapa kali berubah dari monovalen menjadi polivalen kemudian kembali ke monovalen dan menjadi polivalen kembali.

Tabel 5. Bidang keahlian PPL PNS di Kalimantan Barat pada Tahun 2015

Bidang keahlian	Jumlah	
	Orang	Persentase
Tanaman pangan	609	81,85
Peternakan	61	8,20
Perkebunan	49	6,59
Hortikultura	25	3,36
Jumlah	744	100,00

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. Kalimantan Barat, 2015

Komposisi bidang keahlian PPL PNS di Kalimantan Barat memiliki ragam bidang keahlian (Tabel 5). Kondisi bidang keahlian PPL PNS di Kalimantan Barat, umumnya sesuai dengan potensi wilayah tersebut, seperti di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang yang sebagian besar PPL PNS nya memiliki bidang keahlian tanaman pangan sesuai wilayah Kabupaten Sambas yang sebagian besar lahannya diusahakan untuk tanaman pangan terutama padi, sedangkan wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau sebagian besar penyuluhnya memiliki bidang keahlian dan tanaman pangan dan perkebunan, sesuai dengan lahan yang dimiliki yang sebagian diusahakan untuk tanaman pangan, perkebunan karet dan sawit.

Pada saat ini penetapan orientasi tugas tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing kabupaten. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing orientasi tugas tersebut, sehingga diperlukan pertimbangan tertentu bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan pola orientasi tersebut. Namun demikian, kondisi di lapangan di tingkat petani, kebutuhan petani akan informasi, pengetahuan dan inovasi tidak umumnya mencakup semua sub-bidang pertanian, karena terdapat petani yang memiliki dan mengusahakan tanaman pangan, ternak dan juga sekaligus kebun, sehingga dengan keterbatasan SDM penyuluh pertanian yang ada, maka orientasi penyuluh selayaknya bersifat polivalen, sehingga dapat menjawab semua informasi, pengetahuan dan inovasi yang diperlukan petani.

Strategi dalam konstelasi MEA di perbatasan

Kondisi penyuluh pertanian di Kalimantan Barat yang telah diuraikan, khususnya di wilayah perbatasan terkait dengan konstelasi MEA, memberikan gambaran secara umum

pada saat ini, bahwa; 1) Jumlah penyuluh pertanian di beberapa kabupaten di wilayah perbatasan merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah penyuluh pertanian yang ada saat ini, 2) Jumlah minimal ideal penyuluh yang diperlukan setiap desa telah tercukupi, 3) Rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penyuluh pertanian telah cukup baik atau tinggi, 4) Rata-rata lama pengalaman penyuluh dari penyuluh pertanian, terutama PPL PNS, adalah telah lama atau banyak pengalaman, sehingga menjadi hal yang positif. Adapun hal yang berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan di era MEA tersebut adalah; 1) Umur para PPL PNS yang hampir setengahnya berumur di atas 50 tahun dan mendekati umur pensiun atau purna tugas PNS, sehingga dapat berpengaruh terhadap aktivitas fisik penyuluhannya, 2) komposisi bidang keahlian yang dimiliki PPL PNS yang kurang seimbang dan didominasi oleh bidang keahlian tanaman pangan, sedangkan di tingkat lapangan, yaitu petani, memerlukan informasi, pengetahuan dan keterampilan bidang lainnya seperti perkebunan, peternakan dan hortikultura.

Potensi positif yang dimiliki dan potensi penghambat dalam mengembangkan penyuluhan pertanian di wilayah perbatasan dalam konstelasi MEA, memberikan alternatif solusi pengembangan penyuluhan berupa strategi sebagai berikut;

- 1) Mengintegrasikan seluruh kegiatan penyuluhan pertanian dan mengikut sertakan penyuluh pertanian dalam beberapa model pengembangan kawasan perbatasan, seperti di dalam program agropolitan dan desa kebun wilayah perbatasan seperti yang ditetapkan oleh BAPPENAS (2003), yaitu menetapkan bahwa agropolitan merupakan sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/ agroindustri). Dalam kawasan agropolitan masyarakat diharapkan akan berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat perkebunan/pertanian komersial. Pasar dari produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dapat dipasarkan di kota-kota kecil perbatasan, baik didalam maupun luar negeri. Selain itu, pengembangan penyuluhan pertanian sebaiknya terintegrasi dengan program pemerintah lainnya yang telah ditetapkan, seperti pada Rakeppres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang diwujudkan dengan dibentuknya Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) dan salah satunya menurut Edyanto (2007) mengandalkan kepada sektor pertanian, karena memiliki nilai LQ tertinggi dan memiliki nilai lebih dari 1,0 di Kabupaten Sambas, yang diharapkan dapat mengungkit dan mendorong sektor lain di wilayah tersebut. Pengembangan pertanian di kawasan perbatasan selayaknya terintegrasi sesuai Rencana Kawasan Budidaya Bab V Pasal 54 Perpres Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan mengenai kawasan budidaya.
- 2) Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian di 8 kabupaten wilayah perbatasan dengan cara membenahi kembali struktur organisasi penyuluhan pertanian di masing-masing kabupaten dengan memperhatikan integrasi, koordinasi dan konsolidasi dengan dinas, badan atau lembaga lain di kabupaten dan provinsi lingkup pertanian, sehingga diharapkan akan terjadi struktur organisasi penyuluhan pertanian yang jelas, terintegrasi dan solid, seperti yang diungkapkan oleh Mardikanto (2007), bahwa organisasi penyuluhan pertanian selayaknya memanfaatkan sumberdaya pembangunan (terintegrasi) dengan yang telah ada di wilayahnya.
- 3) Melakukan regenerasi SDM penyuluhan pertanian dengan memberdayakan penyuluh senior baik dari PPL PNS atau penyuluh swadaya sebagai nara sumber dalam pendidikan non-formal kepada penyuluh muda atau junior dengan memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman penyuluhan melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan dan pengalaman penyuluhan yang bermanfaat bagi penyuluh junior.
- 4) Melakukan regenerasi penyuluh pertanian dengan mempersiapkan SDM THL-TBPP sebagai penyuluh pertanian yang handal di masa depan, salah satunya dengan memastikan status dan posisi THL-TBPP menjadi PPL PNS, sehingga memberikan kepastian peran kepada THL-TBPP dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di masa mendatang.

- 5) Melakukan peningkatan SDM penyuluh pertanian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek dengan bidang yang sesuai dengan kebutuhan instansi dan wilayah kerja penyuluhannya, sehingga terjadi konsistensi peningkatan ilmu, pengetahuan dan keterampilan penyuluh dengan kebutuhan lingkungan dan eranya.
- 6) Memberdayakan kelompok penyuluh swadaya sesuai mandat Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bab V Pasal 17 dengan memberikan kesempatan yang lebih luas dengan melibatkan penyuluh swadaya dalam seluruh proses penyuluhan pertanian di wilayahnya, mengingat penyuluh swadaya merupakan juga tokoh masyarakat yang dianggap berhasil dan berperan di dalam pembangunan pertanian di wilayahnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan adopsi inovasi dan difusi atau diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi kepada penggunanya yaitu petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian dan pembahasan mengenai strategi penyuluhan pertanian dalam konstelasi MEA di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut;

- 1) Pembangunan pertanian melalui penyuluhan pertanian di beberapa kabupaten yang berdekatan dan berbatasan dengan wilayah perbatasan negara memiliki nilai strategis dan potensi yang tinggi berupa; sebagian besar penyuluh pertanian berada dekat dan di sekitar wilayah perbatasan dengan negara Malaysia, jumlah minimal ideal penyuluh pertanian telah mencukupi sesuai ketentuan yang ada, tingkat pendidikan rata-rata penyuluh pertanian didominasi oleh lulusan sarjana, lama pengalaman rata-rata PPL PNS cukup lama. Namun demikian diperlukan regenerasi para penyuluh pertanian dari penyuluh senior kepada penyuluh yang lebih muda, sehingga diharapkan akan terjadi transfer ilmu, pengetahuan, keterampilan yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan tersebut.
- 2) Strategi penyuluhan pertanian yang sebaiknya dilakukan di wilayah perbatasan tersebut, kaitannya dengan konstelasi MEA adalah berupa; mengintegrasikan pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluh pertanian di dalam kerangka program atau kegiatan terpadu lokal dan nasional di wilayah perbatasan yang telah ada dan ditetapkan, seperti program agropolitan, KPE dan lainnya. Strategi lainnya adalah dengan membenahi, memantapkan dan menetapkan struktur organisasi penyuluhan pertanian, sehingga terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan instansi di wilayahnya. Strategi terakhir adalah dengan memberdayakan penyuluh swadaya dengan melibatkan atau mengikutsertakan penyuluh swadaya dalam seluruh kegiatan atau program penyuluh pertanian di wilayahnya, mengingat potensi yang tinggi dari keberadaan penyuluh pertanian tersebut dalam upaya meningkatkan adopsi dan difusi inovasi teknologi spesifik lokasi di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. 2015. Buku Data Penyusunan Data Base Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak
- Badan Litbang Pertanian. 2013. Panduan Umum Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2015. Kalimantan Barat dalam Angka. BPS Kalimantan Barat. Pontianak

- Bappenas. 2003. Strategi Dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas. Jakarta
- Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .2015. Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta
- Edyanto, H. 2007. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 9 No. 3. BPPT. Jakarta
- Mardikanto, T. 2007. Sistem Penyuluhan Pertanian. Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Perhutanan Nasional, Surakarta.
- Rogers, E.M. 2003. Diffusion of Innovations, fifth edition. Free Press. Newyork
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta
- Tan, A.S, 1987. Appropriate Technologies for Rural Development in Valera, J.B., Martinez, V.A. and Plopino, R.F (Ed). Extension Delivery Systems. Island Publishing House, Inc. Manila